LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PARIWISATA
@2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 telah disusun sesuai dengan ketentuan.

Laporan ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018, yang berdasarkan pada :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 060/15202/SET tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2019 dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD 2020.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 dapat memiliki nilai pertanggungjawaban terhadap publik atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2019.

Jayapura, Januari 2020
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Papua,

YOSEPH I.S. MATUTINA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650211 199503 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, sektor ini sebagai penyumbang devisa terbesar penerimaan Negara ke-2 setelah sektor minyak sawit/migas, untuk itu apabila sektor Pariwisata dikelola dengan baik dan benar, maka akan memberikan penerimaan pendapatan asli daerah dan pada saatnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, maka urusan Pariwisata menjadi urusan pilihan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cata Review Atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 tahun2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Provinsi Papua Nomor. 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor. 43 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Papua harus mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan Pemerintah tersebut mencerminkan tekad dan kesungguhan Pemerintah untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat harus diserahkan dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat lokal yang pelaksanaannya dibantu dan

didampingi oleh tenaga profesional di bidangnya. Untuk itu peran Aparat Pemerintahan perlu dimantapkan sebagai fasilitator, dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat secara luas.

Mengacu pada visi Pamerintah Provinsi Papua, maka dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Dinas Pariwisata Provinsi Papua menetapkan Visi, Yaitu "Pariwisata Papua Yang Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera".

Sedangkan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Papua, adalah :

1. Mewujudkan zona inti pengembangan tapak kawasan pariwisata.
2. Mewujudkan produk pariwisata unggulan.
3. Pemberdayaan masyarakat sadar wisata.
4. Meningkat promosi dan pemasaran pariwisata unggulan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
5. Meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Papua.
6. Menumbuhkembangkan peluang usaha industri jasa pariwisata.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku kreatif.
8. Menciptakan ekonomi kreatif yang responsife, transparan, dan akuntabel.
9. Mengembangkan karya kreatif berbasis seni dan budaya Papua sebagai pilar utama dalam pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.
10. Menetapkan peta penyebaran potensi kawasan menurut 5 (lima) wilayah adat.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

B. Landasan Hukum

Berikut merupakan landasan hukum penyelenggaraan Pariwisata, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor. 1850).
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengalolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2019.
13. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM. 70/KU.104/MP/2019 tentang Rincian dan Alokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2019.
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Papua.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

17. Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 tahun2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
18. Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

C. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah di Provinsi Papua telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Onotomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan.

Kondisi ini menuntut adanya kerangka pola pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan. Untuk itu diperlukan budaya etos kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas.

Kinerja merupakan gambaran untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi. Untuk itu perlu adanya pengukuran dan evaluasi kinerja, karena pengukuran kinerja penting bagi organisasi untuk mengukur hasil kerjanya apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan terhadap administrasi Negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan dasar bagi semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja instansi pemerintah.

Dalam menerapkan manajemen kinerja salah satu fondasi utama adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dengan membandingkan kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan pembandingan kinerja tersebut harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas

Pariwisata, selain itu indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja instasi pemerintah yang sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diembannya. Sehingga jelas bahwa maksud penyusunan LAPKIN ini adalah sebagai bentuk akuntabiltas kinerja instansi pemerintah dengan menjamin adanya peningkatan pelayanan publik serta mampu menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah dan tingkat keberhasilannya dapat diukur.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (Gubernur) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instasi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua, mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
e. Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis; dan
f. Pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata Provinsi Papua, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Destinasi Pariwisata
4. Bidang Pengambangan Kapasitas

5. Bidang Pemasaran Pariwisata
6. Bidang Ekonomi Kreatif

Pembangian pelaksanaan tugas dalam Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Papua dapat diuraikan sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua, terdiri atas :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua di bidang pariwisata;
2. **Sekretariat** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan penyusunan program dinas.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

   a. Penatausahaan urusan umum.

   b. Penatausahaan urusan kepegawaian.

   c. Penatausahaan urusan keuangan dan perlengkapan.

   d. Pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.

   Dalam tugas pokok tersebut sekretariat terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

   a. Sub bagian Program, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dari berbagai bidang untuk penyusunan program dan anggaran;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-surat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya,
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verivikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan barang/perlengkapan.
3. **Bidang Destinasi Pariwisata** mempunyai tugas mengelola urusan obyek dan daya tarik wisata, usaha wisata, dan masyarakat sadar wisata.

   Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :

   a. Seksi obyek. daya tarik dan usaha wisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya Tarik wisata di

lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi pemberdayaan masyarakat sadar wisata, mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan masyarakat dasar wisata lingkup provinsi.

4. **Bidang Pengembangan Kapasitas** mempunyai tugas mengelola urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
   a. Seksi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata lingkup Provinsi.
   b. Seksi kelembagaan pariwisata, mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan pariwisata lingkup Provinsi.
5. **Bidang Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas mengelola urusan pengembangan pasar pariwisata dan promosi dan pengembangan wisata. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
   a. Seksi pengembangan pasar pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pasar pariwisata lingkup Provinsi.
   b. Seksi promosi dan pengembangan wisata, mempunyai tugas melakukan promosi dan pengembangan wisata lingkup Provinsi.
6. **Bidang Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas mengatur, membina dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif lingkup Provinsi.

   Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
   a. Seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya lingkup Provinsi.
   b. Seksi ekonomi kreatif berbasis desain, media dan arsitektur, mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan dan pengambangan ekonomi kreatif berbasis desain, media dan arsitektur lingkup Provinsi.

   Secara umum, jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Papua, hingga akhir tahun 2019, berjumlah 78 orang dengan rincian 78 PNS (100%).

TABEL. 1.2
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN/RUANG
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	INSTANSI	GOLONGAN /RUANG			JUMLAH
		IV	III	II	
1.	DINAS PARIWISATA	12	53	13	**78**

TABEL. 1.3
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI PER JENIS KELAMIN
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA

NO.	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	DINAS PARIWISATA	43	35	**78**

TABEL. 1.4
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI PER PENDIDIKAN
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA

N0.	INSTANSI	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D-IV	D-III	SLTA	SLTP	
1.	DINAS PARIWISATA	13	27	2	18	16	2	78

TABEL. 1.5
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA

No.	Uraian Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1.	Kepala Dinas	1	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	-	1	-
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas	-	1	-
5.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	-	1	-
6.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	-	1	-
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1
8.	Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	-	-	1
9.	Kasubbag Program	-	-	1
10.	Kasi Obyek, Daya Tarik dan Usaha Wisata	-	-	1
11.	Kasi Perberdaraan Masyarakat Sadar Wisata	-	-	1
12.	Kasi Pengembangan Kapasitas SDM	-	-	1
13.	Kasi Kelembagaan Pariwisata	-	-	1
14.	Kasi Pengembangan Pasar Pariwisata	-	-	1
15	Kasi Promosi dan Pengambangan Wisata	-	-	1
16,	Kasi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya	-	-	1
17.	Kasi Ekonomi Rreatif Berbasis Desain, Media dan Arsitektur	-	-	1
Jumlah		**1**	**5**	**11**

TABEL. 1.6
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL YANG TERISI
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019

No.	Uraian Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1.	Kepala Dinas	1	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	-	1	-
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas	-	1	-
5.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	-	1	-
6.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	-	1	-
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1
8.	Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	-	-	1
9.	Kasubbag Program	-	-	1
10.	Kasi Obyek, Daya Tarik dan Usaha Wisata	-	-	1
11.	Kasi Perberdaraan Masyarakat Sadar Wisata	-	-	1
12.	Kasi Pengembangan Kapasitas SDM	-	-	1
13.	Kasi Kelembagaan Pariwisata	-	-	1
14.	Kasi Pengembangan Pasar Pariwisata	-	-	1
15	Kasi Promosi dan Pengambangan Wisata	-	-	1
16,	Kasi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya	-	-	1
17.	Kasi Ekonomi Rreatif Berbasis Desain, Media dan Arsitektur	-	-	1
Jumlah		**1**	**5**	**11**

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Papua sesuai Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor. 43 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua, dapat kami sebagai berikut :.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Papua

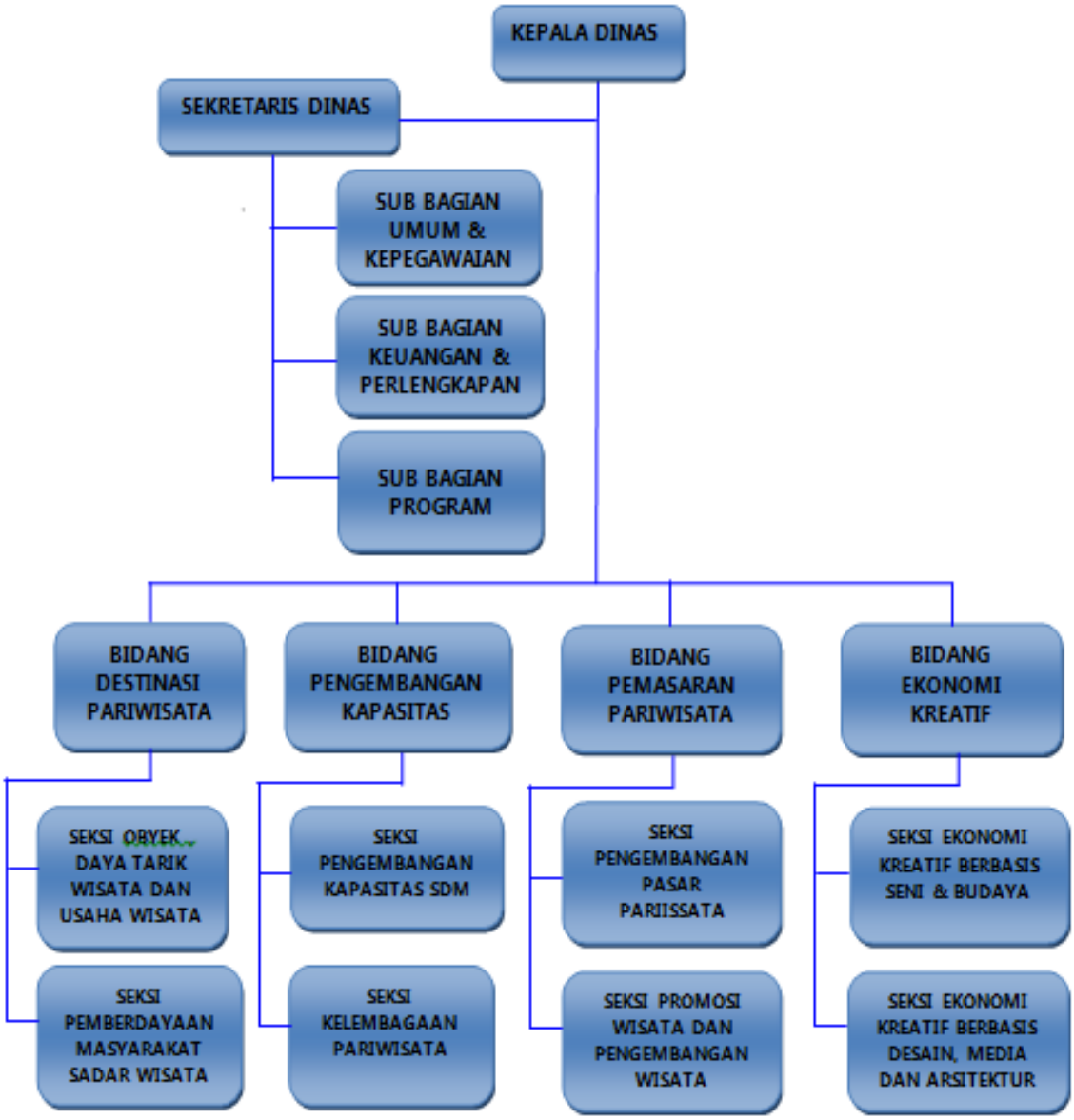

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia dan daya lain agar mampu memenuhi keinginan dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik nasional maupun global.

Rencana Strategis berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur dalam kurun waktu penilain kinerja kepala Instansi/Unit Kerja dengan menggunakan 5 (lima) tolok unur, yaitu masukan (inputs), keluaran (otpots), hasil (Outcame), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi, yang dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi tersebut dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi.

Tujuan dan sasaran dijabarkan kembali yang lebih operasional dalam bentuk strategi. Sasaran dan Program yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dijabarkan dalam perencaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk kurun tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring dengan kebijakan pemerintah tentang penganggaran serta komitmen instansi pemerintah melaksanakan dan mencapainya dalam tahun tersebut.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Disamping itu juga berisi informasi keterkaitan dan keselarasan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program.

Keterkaitan dan keselarasan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja sangat penting dan penentukan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis.

1. Visi Dinas Pariwisata Provinsi Papua

Yang dimaksud dengan Visi adalah pandangan jauh kedepan menyangkut kemana instansi/organisasi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,inovatif, serta produktif (LAN-RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan atau dicapai instansi Pamerintah.

Untuk itu dengan berpedoman pada Visi Pemerintah Provinsi Papua, maka Dinas Pariwisata Provinsi Papua menatapkan visinya sebagai berikut : **"Pariwisata Papua Yang Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera".**

Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Papua sebagai pengemban tugas desentralisasi dan dekosentrasi pembangunan pariwisata berusaha mengelola dan mengembangkan daya tarik wisaya di Provinsi Papua, mempromosikan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, menunbuhkembangkan peluang usaha industri jasa pariwisata, menciptakan ekonomi kreatif yang transparan, dan akuntabel, dan pada saatnya dapat memberikan penerimaan pendapatan asli daerah, meningkatkan pendapatan masayarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakt, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Dinas Pariwisata Provinsi Papaua

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui program-program Dinas Pariwisaata Provinsi Papua.

Bertitik tolak dari visi tersebut di atas, maka Misi Dinas Pariwisata Provinsi Papua, adalah sebagai berikut :

1). **Mewujudkan zona inti pengembangan tapak kawasan pariwisata.**

Zona inti adalah kawasan pariwisata potensial yang akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah dan memuat tapak kawasn, yang dapat disiapkan menjadi kawasan wisata unggulan pada zona inti tersebut.

2). **Mewujudkan produk pariwisata unggulan.**

Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Papua yang variatif dan unik merupakan sumber daya pariwisata potensial yang harus ditata, ditingkatkan dan dikemas dalam paket-lpaket unggulan yang siap dipasarkan.

3). **Pemberdayaan masyarakat sadar wisata.**

Adalah upaya menyiapkan sumber daya pelaku wisata yang bermutu dan berkualitas agar mampu mengolah obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata di dalam zona inti pada destinasi pariwisata nasional.

4). **Meningkat promosi dan pemasaran pariwisata unggulan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.**

Adalah melakukan promosi dan pemasaran pariwisata unggulan baik local, regional, nasional dan internasional secara berkelanjutan.

5). **Meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Papua.**

Adalah upaya mewujudkan peningkatan arus kunjungan wisata wisatawan mancanegara dan lama tinggal (length of stay) Wisman di Papua.

6). **Menumbuhkembangkan peluang usaha industri jasa pariwisata.**

Menumbuhkembangkan peluang usaha dan kesempatan kerja bagi usaha jasa pariwisata.

7). **Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku kreatif.**

Adalah upaya meningkatkan daya saing dan kontribusi pelaku kreatif yang berkualitas dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

8). **Menciptakan ekonomi kreatif yang responsive, transparan, dan akuntabel.**

Merupakan upaya menciptakan ekonomi kreatif yang menarik, terbuka dan terukur.

9). **Mengembangkan karya kreatif berbasis seni dan budaya Papua sebagai pilar utama dalam pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.**

Merupakan upaya peningkatan kualitas karya kriatif sebagai pilar utama dalam pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.

10. **Menetapkan peta penyebaran potensi kawasan menurut 5 (lima) wilayah adat**.

Adalah upaya memperjelas potensi dan keunggulan daerah yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam menetapkan pengembangan tapak kawasan di zona inti.

3. Tujuan

Merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke dapan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi (LAN-RI, 2003:9)

Berdasarkan uraian diatas, maka yang **ditetapkan menjadi tujuan** Dinas Pariwisata Provinsi Papaua, adalah sebagai berikut :

1). Mengembangkan kawasan wisata unggulan di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dalam 5 (lima) Wilayah Adat.
2). Meningkatkan fasilitas penunjang di obyek dan daya tarik wisata yang layak dijual atau dipasarkan pada pasar kompetitif.
3). Mempersiapkan masyarakat sadar wisata yang berkualitas di bidang pariwisata.
4). Meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara (WISMAN) ke Papua.
5). Menciptakan lama tinggal *(length of stay)* wisatawan di Papua dan

konstribusi bagi pendapatan masyarakat dan daerah.

6). Meningkatkan jasa pelayanan pariwisata *(tourism service).*

7). Meningkatkan daya saing dan konstribusi pelaku kreatif.

8). Meningjatkan kapasitas, apresiasi dan profesionalisme pelaku kreatif.

9). Meningkatkan kualitas produksi kreatif seni dan budaya sebagai pilar utama dalam pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.

10. Menyediakan data peta menurut keuanggulan potensi di 5 (lima) Wisayah Adat guna mempermudah dalam perencanaan berkelanjutan.

4. Sasaran.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dan sedang dari tujuan. Selain itu dalam sasaran juga dirancang indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang fokus pada sumber daya organisasi.

5. Strategi

Pariwisata merupakan bidang jasa yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai perekat yang berpotensi menciptakan lapangan kerja yang memberikan nilai tinggi bagi masyarakat dari aspek ekonomi. Bidang Pariwisata merupakan bidang yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap krisis ekonomi. Bidang Pariwisata memberikan nilai lebih karena menawarkan pembangunan yang berkelanjutan melalui kreatifitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing yang memiliki sumber daya yang terbarukan, dengan kata lain Pariwisata adalah manifestasi dari bertahan hidup bagi Negara-negara berkembang.

Pesan besar yang ditawarkan oleh Pariwisata adalah pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreatifitas.

Banyak potensi dan sekaligus permasalahan serta isu baru yang muncul kepermukaan yang membutuhkan cara penanganan dengan pendekatan-pendekatan yang spesifik. Dinamika tersebut perlu diakomodasi ke dalam produk-produk rencana yang ada agar potensi dan permasalahan serta isu-isu baru yang muncul dapat ditampung dan menjadi dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan.

Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Papua, adalah sebagai berikut :

1). Penetapan zona inti pengembangan tapak kawasan pariwisata.
2). Menyiapkan produk pariwisata unggulan.
3). Pemberdayaaan masyarakat sadar wisata.
4). Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata unggulan.
5). Menumbuhkembangkan peluang usaha industry jasa pariwisata.
6). Peningkatan sumber daya pelaku ekonomi kreatif dam kualitas organisasi.
7). Pengembangan dan peningkatan ruang kreatif berbasis kawasan 5 (lima) Wilayah Adat.
8). Menciptakan ekonomi kreatif yang responsive, transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Papua, adalah :

1. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah.
2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

6. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakar agar tercapai kelancaran

dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Adapun program merupakan kumpulan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka pendekatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata meliputi 13 (tiga belas) kebijakan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Papua, meliputi :

1). Penyusunan Perda Pariwisata dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPARDA).
2). Melakukan kerja sama dengan stakeholders (ASITA, HPI DAN PHRI) serta masyarakat pelaku jasa usaha / industri jasa pariwisata untuk membangun pariwisata Papua dan menggali sumber-sumber PAD Provinsi Papua.
3). Membangun data base berbasis Web Site sebagai sumber data potensi wisata yang lengkap dan informasi bagi wisatawan guna menghindari kesalahan informasi dan data dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkalanjutan.
4). Menyusun Panduan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata (RIPOW) bagi Kabupaten/Kota.
5). Pengembangan tapak kawasan pariwisata pada zona inti.
6). Pemberdayaan sumber daya masyarakat sadar wisata.
7). Menumbuhkembangkan peluang usaha industri jasa pariwisata.
8). Produk pariwisata unggulan.
9). Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata unggulan.
10). Peningkatan arus kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Papua.
11). Menetapkan peta penyebaran potensi wisata menurut 5 (lima) Wilayah Adat
12). Peningkatan kualitas sumber daya pelaku kreatif.
13). Pengembangan karya kreatif berbasis seni dan budaya Papua sebagai pilar utama dalam pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.

Adapun program sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Papua, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 7 *(Tujuh) Program* yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4. dan Keuangan.
5. ProgramPengembangan Destinasi Pariwisata.
   Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
6. Program Pengambangan Kemitraan.
7. Program Pengambangan Kapasitas.

Dari 7 (Tujuh) Program dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan, sebagai berikut :

Sasaran 1. ***Sasaran 2.*** ***Sasaran 3.***	***Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah.*** ***Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.*** ***Meningkat Akuntabilitas Kinerja.***
Kebijakan	**Program**
1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. 2) Penyusunan PERDA dan RIPPARDA. 3) Meningkatkan kerja sama dengan stakeholders (ASITA, HPI DAN PHRI) serta masyarakat pelaku jasa usaha / industri jasa pariwisata untuk membangun pariwisata Papua dan menggali sumber-sumber PAD Provinsi Papua. 4) Membangun data base berbasis Web Site sebagai sumber data potensi wisata yang lengkap dan informasi bagi wisatawan guna menghindari kesalahan informasi dan data dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkalanjutan.	1) Pelayanan Administrasi Perkantoram. 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran 1. ***Sasaran 2.*** ***Sasaran 3.***	***Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomien daerah.*** ***Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.*** ***Meningkat Akuntabilitas Kinerja.***		
Kebijakan		**Program**	
1) Produk pariwisata unggulan. 2) Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata unggulan. 3) Peningkatan arus kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Papua. 4) Menetapkan peta penyebaran potensi wisata menurut 5 (lima) Wilayah Adat		1)	Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata.

Sasaran 1. ***Sasaran 2.*** ***Sasaran 3.***	***Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah.*** ***Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.*** ***Meningkat Akuntabilitas Kinerja.***		
Kebijakan		**Program**	
1) Menyusun Panduan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata (RIPOW) bagi Kabupaten/Kota. 2) Pengembangan tapak kawasan pariwisata pada zona inti. 3) Pemberdayaan sumber daya masyarakat sadar wisata. 4) Menumbuhkembangkan peluang usaha industri jasa pariwisata.		1)	Program Pengambangan Destinasi Pariwisata.

Sasaran 1. ***Sasaran 2.*** ***Sasaran 3.***	***Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah.*** ***Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.*** ***Meningkat Akuntabilitas Kinerja.***		
Kebijakan		**Program**	
1) Peningkatan kualitas sumber daya pelaku kreatif. 2) Pengembangan karya kreatif berbasis seni dan budaya Papua sebagai pilar utama dalam pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.		1)	Program Pengambangan Kemitraan dan Kapasitas

B. RENCANA KINERJA

Perencanaan strategis yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata Provinsi Pupua dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja dimaksud menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2019.

Rencana Kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai dengan rencana capaian kinerja tahunan sesuai dengan indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen seluruh staf di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Papua untuk melaksanakan dan mencapainya dalam kurun waktu satu tahun 2019.

Rencana Kerja Tahunan meliputi sasaran, indikator kinerja, program dam kegiatan, indikator kinerja kegiatan, meliputi indikator input, Output, Outcame, benefit, dan impact. Dalam penetapan indikator-indikator tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun Anggaran 2019, Dinas Pariwisata Provinsi Papua telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019, selanjutnya telah dibreakdown ke dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian diatas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019 disediakan dana sebesar Rp 14.398.211.000,- (Empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan pada **Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)** Dinas Pariwisata Provinsi Papua tahun 2019 berubah menjadi **Rp 15.398.211.000,-** (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah) yang disusun dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Penetapan Sasaran Strategis.

Dinas Pariwisata Provinsi Papua telah mengidentifikasi 3 (Tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2019. Untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program.

Berdasarkan strategis pencapaian tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Papua dan sasaran yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan merupakan program yang ada dalam lingkup kebijakan bidang organisasi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019.

3. Penetapan Kegiatan

Dinas Pariwisata Provinsi Papua dalam tahun anggaran 2019 telah menetapkan kgiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing program.

4. **Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan**

Penetapan indikator kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan pada akhir tahun. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan akan laksanakan sesuai dengan indikator kegiatan yang meliputi indikator kinerja inputs, outputs, outcomes benefits, dan impacts.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam tahun anggaran 2019 Dinas Pariwisata Provinsi Papua telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan per periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana OTSUS-UB, Dana OTSUS dan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata) yang membiayai 32 (tiga puluh dua) kegiatan, sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
7. Penyediaan makanan dan minuman.
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
12. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
13. Pemilihan putra putri Pariwisata Papua.
14. Dukungan dan penguatan pada Festival Wisata Daerah
15. Pengadaan Bahan Promosi
16. Pemilihan Duta Wisata Indonesia (Tingkat Nasional).
17. Survey dan Data Penyusunan Data Analisa Pasar
18. TOT Analisa Pasar Wisata
19. Penyuluhan dan Penguatan Kelompok Sadar Wisata.
20. Pembangunan Kawasan Wisata (Tourism Resort)
21. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
22. Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK)
23. Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW)
24 Pelatihan Ekonomi Kreatif
25. Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (Anyam noken, gerabah, ukir)
26. Pelatihan Media Kreatif (Fotografi dan Animasi)
27. Pameran Pekan Budaya dan Seni Kreatif
28. Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif
29. Workshop Mitra Usaha Pariwisata
30. Pelatihan Sertifikasi SDM bagi Karyawan Hotel dan Restoran
31. Pelatihan SDM bagi Pemandu Pariwisata
32. Pelatihan Pengembangan SDM Kepariwisataan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah membandingkan rencana dengan realisasi yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\textit{Capaian indikator kinerja} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \times 100\ \%$$

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\textit{Capaian indikator kinerja} = \frac{\textit{Rencana-(Realisasi-Rencana)}}{\textit{Rencana}} \times 100\%\ \textit{(Target Realisasi)}$$

Atau :

$$\textit{Capaian indikator kinerja} = \frac{\textit{(2 x Rencana) - Realisasi}}{\textit{Rencana}} \times 100\%\ \textit{(Target Realisasi)}$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan, pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat secara jelas.

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal, sebagai berikut :

Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
90 s/d 100	**Sangat Berhasil**
80 s/d < 90	**Berhasil**
70 s/d < 80	**Cukup Berhasil**
< 70	**Kurang Berhasil**

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja sesuai pelaksanaan kegiatan berdasarkan dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja ini baru sebatas pada pegukuran kinerja yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan *(Inputs) dan* keluaran *(Outputs).*

Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcame), sedangkan manfaat dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitan dengan tujuan dan sasaran. Hal tersebut mengingatsistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, belum sepenuhnya terbangun.

Dengan demikian pengukuran kinerja marupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

Pengukuran kinerja yang dilakukan, mencakup :

a) Kinerja kegiatan adalah merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kegiatan. Pengukuran kinerja ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
b) Tingkat capaian sasaran merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kenerja Tahunan (RKT) dimana tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Capaian Sasaran.

Uraian kerja selanjutnya terdapat pada lampiran formulir : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan pada lampiran Evaluasi Kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Pariwisata Provinsi Papua merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Papua telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 yang telah dibreakdown ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwsata Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan yang tertuang dalam DPASKPD merupakan rencana kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 yang disusun dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai.

Evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 telah dilakukan pula efisiensi dengan cara menbandingkan antara Output dan Input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dinas Pariwisata Provinsi Papua berusaha mewujudkan misi, untuk itu dilakukan dengan mewujudkan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah.
2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja yang dicapai (Realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-maing indokator, yaitu indikator inputs, outputs, dan outcomes.

Analisa akuntabilitas berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah.
Sasaran 2 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Keberhasilan untuk capaian sasaran 1, 2 dan 3 ini diukur melalui 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja sebagaimana tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan tabel 5, berikut ini :

Tabel 1

NO.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Penyediaan jasa surat-menyurat	1200 Surat	1200 Surat	99,35%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8 Layanan	8 Layanan	99,63%
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4 Orang	4 Orang	100%
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 jenis	12 jenis	99,43%
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	12 Bulan	12 Bulan	99,00%
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 buku	12 buku	99,88%
7.	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	99,90%
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	41 kali	41 kali	99,98%
9.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opearsional	11 Unit	11 Unit	99,99%
10.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4 unit	4 unit	100%

11.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 laporan	20 laporan	5,88%
12.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	12 laporan	12 laporan	5,33%
JUMLAH				**84,03%**

Untuk mencapai indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, sasaran 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, pada Dinas Pariwisata Provinsi Papua, pada tabel 1 sasaran kegiatan ini bersifat rutin dimana tahun 2019 telah dilaksanakan 3 (tiga) Program yang membiayai 12 (dua belas) kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja **84,03 %** dan menurut skala pengukuran ordinalnya dikategorikan *Berhasil.*

Pencapaian Kinerja kegiatan sebagai berikut :

Pada awal perencanaan dan penyusunan RKA tahun 2019, penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan lintas SKPD atau kegiatan yang bersifat rutin hanya direncanakan dan dianggarkan selama 3 (tiga) bulan kedepan, sehingga pada perubahan anggaran diberikan tambahan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan hanya diperuntukan bagi kegiatan rutin atau lintas SKPD dari sumber dana PAD dengan rincian dan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa surat menyurat disediakan dana pada DPA SKPD semula sebesar Rp 750.000,- dan pada DPA Perubahan SKPD menjadi Rp 8.300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 8.246.000,- dengan capaian target 99,35%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini membiayai paket pengiriman surat-surat, perangko, meterai, dan benda pos lainnya untuk Dinas Pariwisata Provinsi Papua.
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sebelum perubahan disediakan dana sebesar Rp. 9.000.000,- dan pada DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 18.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 17.933.049,- dengan capaian kinerja sebesar 99,63% , dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai jasa komunikasi sebanyak 8 layanan, untuk keperluan Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan, sebelum perubahan disediakan dana sebesar Rp. 41.600.000,- dan sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 124.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 124.800.000,- dengan capaian target kinerja sebesar 100%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai jasa tenaga honorer 4 orang selama 12 bulan

4) Penyediaan alat tulis kantor, sesuai DPA SKPD disediakan dana sebesar Rp 29.440.000,- dan pada DPA Perubahan SKPD tetap sebesar Rp 176.089.650,- realisasi keuangan sebesar Rp 175.080.000,- dengan capaian target kinerja sebesar 99,43%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai belanja pengadaan alat tulis kantor sebanyak 12 jenis barang ATK.

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, disediakan dana pada DPA SKPD semula sebesar Rp 7.400.000,- pada DPA Perubahan SKPD menjadi Rp 49.246.350, realisasi keuangan sebesar Rp 48.756.250,- dengan capaian kinerja sebesar 99,00%, dari rencana target kinerja 100%, kegiatan ini untuk membiayai belanja penggandaan, penjilidan dan foto copy dokumen selama 12 bulan, untuk Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

6) Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan, sesuai DPA SKPD disediakan dana sebesar Rp 2.800.000,- pada DPA Perubahan SKPD tetap sebesar Rp 8.400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 8.390.000,- dengan capaian kinerja sebesar 99,88%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai belanja surat kabar/Koran dan buku bacaan sebanyak 12 buku.

7) Penyediaan makanan dan minuman, sesuai DPA SKPD semula disediakan dana sebesar Rp 11.000.000,- pada DPA Perubahan SKPD menjadi sebesar Rp 48.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 47.950.800,- dengan capaian kinerja sebesar 99,90%, dari rencana target kinerja 100%, kegatan ini untuk membiayai belanja makan dan minum rapat-rapat, dan makan munim tamu selama 12 bulan.

8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, sesuai DPA SKPD semula disediakan dana sebesar Rp 40.400.000,- pada DPA Perubahan SKPD menjadi Rp 455.050.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 454.941.100,- dengan

capaian kinerja sebesar 99,89%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 41 kali.

9) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sesuai DPA SKPD semula disediakan dana sebesar Rp 7.360.000,- pada DPA Perubahan SKPD menjadi Rp 98.364.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 98.351.003,- dengan capaian kinerja sebesar 99,99%, dari rencana target sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai servis, suku cadang, dan bahan bakar (BBM), pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 sebanyak 11 unit kendaraan dinas.

10) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, sesuai DPA SKPD tidak disediakan dana namun pada DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 88.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 87.997.000,-, capaian target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan computer dan laptop sebanyak 4 unit, maintanance aplikasi data base dan web site dinas 12 bulan.

11) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, sesuai DPA SKPD semula disediakan dana sebesar Rp 250.000,- pada DPA-Perubahan SKPD menjadi Rp 38.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.250.000,- dengan capaian kinerja sebesar 5,88%, kegiatan ini hanya untuk membiayai penggandaan dan jilid laporan sebanyak 20 Buku Laporan.

12) Penyusunan laporan keuangan semesteran, sesuai DPA SKPD semula tidak disediakan namun pada DPA-Perubahan SKPD menjadi Rp 37.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 5,33%, kegiatan ini hanya untuk membiayai penggandaan dan jilid laporan sebanyak 12 Buku Laporan.

Tabel 2

NO.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Pemilihan putra putri pariwisata Papua	100 Buku	100 Buku	97,60%
2.	Dukungan dan penguatan pada Festival Wisata Daerah	30 Org Peserta	30 Org Peserta	99,50%
3.	Pengadaan Bahan Promosi	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	99,74%
4.	Pemilihan Duta Wisata Indinesia	50 Orang	50 Orang	99,80%
5.	Survey dan data penyusunan data analisa pasar	1 Unit 100%	1 Unit 100%	99,99%
6.	TOT Analisa pasar wisata	1 Pasang/ 2 Orang	1 Pasang/ 2 Orang	98,45%
JUMLAH				**99,18%**

Untuk mencapai indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, sasaran 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabnilitas Kinerja, pada Dinas Pariwisata Provinsi Papua, pada **tabel 2** sasaran kegiatan ini merupakan program pengembangan pemasaran pariwisata tahun 2019 dengan pembiayaan bagi 6 (enam) kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja **99,18%** dan menurut skala pengukuran ordinalnya dikategorikan *Sangat Berhasil.*

Pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Pemilihan putra putri pariwisata Papua, pada DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 390.385.500,- capaian target kinerja sebesar 97,60%, dari rencana target kinerja 100%, untuk membiayai kegiatan pemilihan putra putri pariwisata Papua tahun 2019 sebanyak 30 orang peserta yang pelaksanaannya di Kabupaten Boven Digoel dan menghasilkan 1 pasang pemenang putra dan putri tingkat provinsi yang akan mewakili Provinsi Papua di ajang pemilihan duta wisata Indonesia di Tingkat Nasional.

2) Dukungan dan penguatan pada Festival Wisata Daerah, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 428.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 425.850.200,- dengan capaian kinerja sebesar 99,50%, dari rencana target kinerja 100%, kegiatan ini untuk membiayai belanja dukungan dan penguatan pada festival daerah di 5 Kabupaten/Kota, yaitu pada Festival Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, Festival Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Festival Humbolt di Kota Jayapura, Festival Ndambu di Kabupaten Merauke dan Festival Byak Munara Wampasi di Kabupaten Biak Numfor.
3) Pengadaan Bahan Promosi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sesuai dengan DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 398.960.000,- dengan capaian kinerja sebsar 99,74% dari rencana target kinerja 100%, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan bahan promosi sebaanyak 4000 lembar.
4) Pemilihan Duta Wisata Indonesia, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 250.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 249.489.000,- dengan capaian kinerja sebesar 99,80%, dari rencana target kinerja 100%, kegiatan ini untuk membiayai keikutsertaan 1 pasang putra/putri pariwisata yang mewakili Provinsi Papua dalam pelaksanaan Pemilihan Duta Wisata Indonesia di Tingkat Nasional tahun 2019.
5) Survey dan data penyusunan data analisa pasar sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 150.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 149.987.300,-dengan capaian target kinerja sebesar 99,99% dari rencana target kinerja 100%, kegiatan ini untuk membiayai survey dan penyusunan dan data potensi wisata, untuk keperluan Dinas Pariwisata Provinsi Papua.
6) TOT Analisa Pasar, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp. 329.039.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 323.926.700,- capaian target kinerja sebesar 98,45%, dari rencana capaian target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai pelaksanaan Training Of Trainer Analisa Pasar sebanyak 10 orang, untuk keperluan Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

Tabel 3

NO.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Penyuluhan dan Penguatan Kelompok Sadar Wisata	30 Orang	30 Orang	99,79%
2.	Pembangunan kawasan wisata (tourism resort)	4 Kabupaten	4 Kabupaten	99,32%
3.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	1 unit	1 unit	97,41%
4.	Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK)	2 lokasi	2 lokasi	97,46%
5.	Pelatihan pengelola daya tarik wisata (DTW)	20 Orang peserta	20 Orang peserta	96,85%
JUMLAH				**98,16%**

Untuk mencapai indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, sasaran 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan sasaran 3. Meningkatnya Akuntabnilitas Kinerja, pada Dinas Pariwisata Provinsi Papua, pada **tabel 3** sasaran kegiatan ini merupakan program pengembangan destinasi pariwisata tahun 2019, dengan pembiayaan pada 5 (lima) kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja **98,16%** dan menurut skala pengukuran ordinalnya dikategorikan *Sangat Berhasil.*

Pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Penyuluhan dan Penguatan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Jayawijaya, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 521.560.100,- realisasi keuangan sebesar Rp 520.440.550,- dengan capaian terget kinerja sebesar 99,79% dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata sebanyak 30 orang peserta.
2) Pembangunan kawasan wisata (Tourism Resort) di 4 Kabupaten disediakan dana pada DPA Perubahan SKPD sebesar Rp 2.714.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 2.695.496.000,- capaian kinerja sebesar 99,32%, dari rencana target kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini untuk pembiayaan pembangunan 10 unit

bangunan yaitu jalur penjalan kaki, tempat ibadah, kamar ganti/toilet, plaza pusat jajanan, tempat parkir, dan dive center.

3) Pengembangan obyek pariwisata unggulan, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 555.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 540.605.000,- dengan capaian kinerja sebesar 97,41%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai pekerjaan Pembangunan pondok wisata, pengadaan kitchen set dan pengadaan fasilitas kamar tidur
4) Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 5.248.211.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.114.890.000,- dengan capaian kinerja sebesar 97,46 % dari rencana target kegiatan 100%, kegiatan bersumber dari dana DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2019, berupa pembuatan ruang ganti dan/toilet 10 unit, pembuatan gazebo 16 unit, pembuatan Pembuatan plaza pusat jajanan kuliner 4 unit, pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, pembangunan dive center 1 unit dan pengadaan Peralatan selam.
5) Pelatihan pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) sesuai dengan DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp. 438.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 424.181.100,- dengan capaian kinerja sebesar 96,85% dari rencana target kegiatan 100% kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta

Tabel 4

NO.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Pelatihan Ekonoi Kreatif	30 Orang Peserta	30 Orang Peserta	100%
2.	Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (Anyam Noken, Gerabah dan Ukir)	30 Orang Peserta	30 Orang Peserta	94,97%
3.	Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi)	30 Orang Peserta	30 Orang Peserta	99,60%
4.	Pameran pekan budaya dan seni kreatif	100 Orang peserta	100 orang peserta	91,04%
5.	Pengadaan peralatan ruang kreatif	100 buah	20 Orang Peserta	99,37%
JUMLAH				**96,99%**

Untuk mencapai indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, sasaran 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabnilitas Kinerja, pada Dinas Pariwisata Provinsi Papua, pada **tabel 4** sasaran kegiatan ini merupakan program pengembangan kemitraan pariwisata tahun 2019, dengan pembiayaan untuk 5 (lima) kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja **96,99%** dan menurut skala pengukuran ordinalnya dikategorikan *Sangat Berhasil.*

Pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Pelatihan Ekonomi Kreatif di Kota Jayapura, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 300.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 300.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100% dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai kegiatan pelatihan ekonomi kreatif sebanyak 30 orang.
2) Pelatihan seni kerajinan tangan (Anyam Nokem, gerabah dan Ukir), di Kabupaten Keerom, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 300.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 284.906.400,- dengan capaian kinerja 94,97%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan

ini membiayai pelatihan seni kerajinan tangan (Anyam Nokem, gerabah dan Ukir) sebanyak 30 orang peserta dan hibah barang kepada masyarakat/pihak ketiga berupa peralatan kerajinan sebanyak 3 set.

3) Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi), sesuai DPAPerubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 350.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 348.600.000,- dengan capaian kinerja sebesar Rp 99,60%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai kegiatan pelatihan media kreatif sebanyak 30 orang dan hibah barang kepada pihak ketiga/masyarakat berupa peralatan fotografi.

4) Pameran pekan budaya dan seni kreatif, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 500.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 455.186.500,-capaian kinerja sebesar 91,04%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini pameran pekan budaya dan seni kreatif diikuti oleh 100 orang peserta

5) Pengadaan peralatan ruang kreatif, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 129.334.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 128.514.000,- dan capaian kinerja 99,37%, dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan pengadaan peralatan ruang kreatif melaksanakan pengadaan sebanyak 100 buah item peralatan.

Tabel 5

NO.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Workshop Mitra Usaha Pariwisata	60 Orang Peserta	60 Orang Peserta	99,87%
2.	Pelatihan sertiikasi SDM bagi karyawan hotel dan restoran	7 Orang peserta	7 Orang peserta	99,97%
3.	Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata	70 Orang peserta	70 Orang peserta	97,91%
4.	Pelatihan pengembangan SDM kepariwisataan	20 Orang Peserta	20 Orang Peserta	98,88%
Jumlah				**99,15%**

Untuk mencapai indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, sasaran 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabnilitas Kinerja, pada Dinas Pariwisata Provinsi Papua, pada **tabel 5** sasaran kegiatan ini merupakan program pengembangan kapasitas pariwisata tahun 2019, dengan pembiayaan bagi 2 (dua) kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja **99,15%** dan menurut skala pengukuran ordinalnya dikategorikan *Sangat Berhasil.*

Pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Workshop Mitra Usaha Pariwisata di Kabupaten Mimika, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 199.739.600,- dengan capaian kinerja sebesar 99,87% dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Workshop Mitra Usaha Pariwisata dan diikuti oleh 60 orang peserta.
2) Pelatihan sertifikasi SDM bagi karyawan hotel dan restoran, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp. 206.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 206.332.700,- dengan capaian kinerja sebesar 99,97% dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini dilaksanakan bagi peningkatan SDM karyawan hotel dan restoran sebanyak 7 orang.
3) Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata di Kabupaten Jayawijaya, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 391.630.000,- dengan capaian kinerja sebesar 97,91% dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini dilaksanakan bagi peningkatan SDM pemandu pariwisata yang diikuti 70 orang peserta .
4) Pelatihan pengembangan SDM kepariwisataan, sesuai DPA Perubahan SKPD disediakan dana sebesar Rp. 428.666.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 423.865.400,- dengan capaian kinerja sebesar 98,88% dari rencana target kinerja sebesar 100%, kegiatan ini dilaksanakan bagi peningkatan dan pengembangan SDM kepariwisataan yang diikuti oleh sebanyak 20 orang.

3. ASPEK KEUANGAN

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, Dinas Pariwisata Provinsi Papua mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana OTSUS-UB, Dana OTSUS dan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata) serta dana dekonsentrasi Kementerian Pariwisata RI Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1) **DANA APBD**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Papua dengan total pagu Belanja Langsung sebesar **Rp 15.398.211.000,-** terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.150.000.000,- , Dana OTSUS-UB sebesar Rp 5.000.000.000,- ; Dana OTSUS sebesar Rp. 4.000.000.000,- Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata) sebesar Rp 5.248.211.000,-

Dengan Realisasi Penyerapan anggaran sebesar Rp **15.049.681.152,-** atau 97,74% dari pagu anggaran APBD sebesar Rp **15.398.211.000,-** dengan sisa anggaran sebesar Rp **348.529.848,-**

2) **DANA APBN/Dekonsentrasi.**

Dana Dekonsentrasi sektoral dari Kementerian Pariwisata RI (APBN) terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) Kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar **Rp 1.673.656.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.670.787.886,-** dengan persentase capaian kinerja 99,83% dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 2.868.114,-**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dari bulan Januari sempai dengan 31 Desember 2019, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dimaksudkan menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pamerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riwiew Atas Laporan Kinerja.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2019 masih dihadapkan pada masalah pelaksanaan kegiatan yang masih berorentasi pada anggaran, anggaran kegiatan yang masih sering terlambat pencairannya dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur dalam mengelola anggaran dan kegiatan terutama dalam proses pelelangan serta masalah-masalah teknis di lapangan yang sering terjadi. Hal yang mangakibatkan penyerapan anggaran, capaian target kinerja pada Dinas Pariwiata Provinsi Papua Tahun 2019 sedikit terlambat karena terkait dengan proses tagihan pada pekerjaan fisik. Hal lain yang mengakibatkan keterlambatan adanya penerimaan DPA SKPD dan proses penyaluran dana DAK Reguler Fisik Bidang Pariwisata.

Pada pada Tahun 2019 realisasi penyerapan anggaran terhadap kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Papua yang berasal dari dana APBD sebesar Rp **Rp. 15.049.681.152,- atau 97,74%,** dari pagu Dana sebesar **Rp 15.398.211.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran yang berasal dari dana APBN/Dekonsentrasi sebesar **Rp Rp. 1.670.787.886,- atau 99,83%** dari pagu dana **Rp 1.673.656.000,-**

Dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran, pada dasarnya tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan pada Tahun 2019. Hal tersebut sangat dipengaruhi dengan etos kerja dan semangat para pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Papua dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing. Pencapaian hasil kegiatan-kegiatan

Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena pengelolaan keuangan dan proses pelelangan yang tidak maksimal.

Demikian Laporan Kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Papua ini dibuat, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kepada Pamerintah Provinsi Papua dan sebagai bentuk pertanggung jawan kepada publik, diharapkan dapat memacu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan ke depan Dinas Pariwisata Provinsi Papua dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI PAPUA,

YOSEPHUS MATUTINA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199503 1 003